

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENELITIAN INDIVIDUAL

Studi Perilaku Knowledge Sharing Di Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Barang Dan Jasa Pada Institusi Keagamaan Islam Negeri Di Indonesia



Diajukan Untuk Pengusulan Penelitian Individual Yang Dibiayai Oleh DIPA
IAIN Surakarta Tahun Anggaran 2017

Oleh:
Peneliti:

Nama	:	M.Rahmawan Arifin, M.Si
NIP	:	19720304 200112 1 004
Prodi/ Jurusan	:	Akuntansi Syariah
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Mahasiswa Pembantu Penelitian:

Nama	:	Yuliana Hanifah
NIM	:	135131216
Prodi/ Jurusan	:	Akuntansi Syariah
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
TAHUN 2017

SURAT PERNYATAAN PENELITI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Rahmawan Arifin
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 4 Maret 1972
NIP : 1972 0304 2001 12 1 004
Pangkat/ Gol : VIA
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Penelitian : FINANCE'S KNOWLEDGE SHARING : PERHITUNGAN
BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
(BOPTN) PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
ISLAM NEGERI


Menyatakan bahwa :

1. Penelitian yang saya usulkan ini tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan bantuan dari pihak manapun;
2. Usulan penelitian ini belum pernah dilaksanakan penelitian sebelumnya;
3. Penelitian ini original hasil karya saya sendiri dan bukan plagiasi dan saya bertanggung jawab penuh jika dikemudian hari timbul gugatan atas hasil penelitian ini.

Surakarta, 7 Mei 2017

Yang membuat pernyataan,

Peneliti



M. Rahmawan Arifin

NIP 1972 0304 2001 12 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Peneliti : M. Rahmawan Arifin
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/ Prodi : Perbankan Syariah
Judul Penelitian : FINANCE'S KNOWLEDGE SHARING : PERHITUNGAN
BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
(BOPTN) PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
ISLAM NEGERI
Sumber Dana : DIPA IAIN Surakarta Tahun 2017
Total Biaya Penelitian : Rp. 17.500.000,00
Lama Penelitian : 2 Bulan
Telah direview pada tanggal : 4 – 7 September 2017

Surakarta, 2017

Ketua LP2M IAIN Surakarta

Dr. Ismail Yahya, M. A.

NIP 1975 0409 199903 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Besaran biaya pendidikan harus senantiasa mengacu pada asas-asas keadilan dan kewajaran. Oleh karena itu, setiap instansi pendidikan seyogyanya melakukan kalkulasi terhadap seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui secara konkret terkait besaran dana yang dibutuhkan. Pemisahan yang jelas dan pasti, terkait mana yang menjadi tanggungan pemerintah dan mana yang dibayarkan mahasiswa harus dapat dilakukan. Namun untuk melaksanakan hal tersebut, instansi pendidikan perlu merancang suatu konsep pembiayaan melalui analisis biaya yang terstruktur dan menyeluruh.

Berdasarkan surat edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari 2013, seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia diinstruksikan untuk melaksanakan 2 hal terkait besaran biaya pendidikan yakni :

1. Menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru program S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.
2. Menetapkan dan melaksanakan tarif Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa baru S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.

Dengan terbitnya surat edaran tersebut, pada dasarnya seluruh perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta, diimbau untuk dapat memberkukan tarif tunggal untuk biaya kuliah kepada mahasiswa program studi Strata 1 (Sarjana).

Konsep UKT merupakan suatu konsep dimana sistem pembayaran akademik yang dibebankan kepada mahasiswa program studi Strata 1 (S-1) dengan membayar biaya satuan pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pertimbangan internal universitas / institut masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengurangi beban finansial mahasiswa baru, sehingga mahasiswa baru tak

perlu membayar berbagai macam biaya, hanya cukup membayar UKT yang sama setiap semester selama kuliah.

Pemberlakuan UKT bukan serta merta menetapkan besaran tarif biaya satuan kepada mahasiswa, tetapi melalui tahapan perhitungan *unit cost* atau biaya satuan per mahasiswa. Biaya satuan tersebut memperhitungkan komponen-komponen biaya penunjang pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Secara umum konsep perhitungan biaya satuan pendidikan (*Unit Cost*) terdiri atas 2 aspek, yakni biaya langsung (*Direct Cost*) ditambah dengan biaya tidak langsung (*Indirect Cost*). Biaya langsung merupakan nilai sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas inti. Biaya langsung terdiri dari biaya tenaga kerja langsung (gaji dan honor dosen), bahan habis pakai pembelajaran, serta sarana dan prasarana pembelajaran langsung. Sedangkan Biaya tidak langsung adalah nilai dari sumber daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas manajerial baik di tingkat fakultas maupun universitas.

Konsep perhitungan *unit cost* pada instansi pendidikan pada dasarnya mengacu pada analisis biaya produksi, dimana untuk menghasilkan suatu produk (*output*) diperlukan sejumlah *input* (faktor produksi). Biaya adalah nilai dari sejumlah *input* yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk (*output*). Pada instansi pendidikan, untuk menghasilkan suatu pelayanan pendidikan yang berkualitas dan bermutu, dibutuhkan banyak *input* yang dapat menunjang proses pelayanan pendidikan. Output atau produk jasa layanan pendidikan yang dihasilkan, tergantung dari besarnya jumlah *input* yang diterima. Semakin besar *input* semakin baik pula *output*.

Dalam bidang pendidikan, produk yang dihasilkan sebagian besar berupa jasa yaitu jasa pelayanan. Misalnya kegiatan belajar mengajar, praktikum lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan sebagainya. Agar dapat menghasilkan jasa tersebut, maka diperlukan sejumlah *input*. *Input* tersebut ada yang langsung digunakan dan dirasakan oleh pengguna jasa pendidikan dalam hal ini adalah mahasiswa, misalnya tenaga pengajar, sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar, dan ada pula yang tidak langsung digunakan oleh mahasiswa, tetapi sangat

dibutuhkan demi kelancaran pelayanan misalnya: alat tulis kantor, meubelair, listrik, air, jejaring pelayanan kesehatan dsb.

Dalam konsep perhitungan biaya satuan per mahasiswa (*unit cost*) dilakukan pula analisis biaya. Dimana analisis biaya adalah suatu kegiatan menghitung biaya untuk berbagai jenis pelayanan yang ditawarkan, baik secara total maupun pelayanan per mahasiswa dengan cara menghitung seluruh biaya pada seluruh unit yang ada dimana biaya yang terdapat pada unit yang tidak menghasilkan produk (pusat biaya) didistribusikan kepada unit-unit yang menghasilkan produk dan menghasilkan pendapatan (pusat pendapatan). Tujuan analisis biaya adalah mendapatkan gambaran mengenai unit/bagian yang merupakan “Pusat Biaya” (*Cost Center*) serta “Pusat Pendapatan” (*Revenue center*); Mendapatkan gambaran biaya pada tiap unit tersebut, baik biaya tetap (*Fixed cost*) atau biaya investasi yang disetahunkan maupun biaya tidak tetap (*Variable cost*) atau biaya operasional dan pemeliharaan; Mendapatkan gambaran biaya satuan pelayanan di sarana pelayanan kesehatan primer; Mendapatkan gambaran tarif dengan menggunakan *Break Even Point*; Mendapatkan gambaran dan peramalan pendapatan sarana dan prasarana utama.

Di dalam terminologi administrasi keuangan, khususnya administrasi keuangan bidang pendidikan, dibedakan antara biaya (*cost*) dan pembelanjaan (*expenditure*). Biaya (*cost*) adalah nilai besar dana yang diperkirakan perlu disediakan untuk membiayai kegiatan tertentu, misalnya kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan, dan sebagainya. Sedangkan pembelanjaan (*expenditure*) adalah besar dana riil yang dikeluarkan untuk membiayai unit kegiatan tertentu, misalnya kegiatan praktikum siswa. Oleh karena itu, seringkali muncul adanya perbedaan antara biaya yang dianggarkan dengan pembelanjaan riil.

Secara bahasa biaya (*cost*) dapat diartikan pengeluaran, dalam istilah ekonomi, biaya/pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Dan biaya pendidikan. Biaya pendidikan merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan uang)

Dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per mahasiswa (*unit cost*). Biaya satuan ditingkat universitas merupakan *aggregate* biaya pendidikan tingkat universitas baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikerluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per mahasiswa merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan universitas secara efektif untuk kepentingan mahasiswa dalam menempuh pendidikan. Oleh karena biaya satuan ini diperoleh dengan memperhitungkan jumlah mahasiswa pada masing-masing universitas, maka ukuran biaya satuan dianggap *standard* dan dapat dibandingkan antara universitas yang satu dengan yang lainnya.

Merujuk pada pengelolaan anggaran keuangan di perguruan tinggi khususnya dilingkungan Kementerian Agama, sistem yang digunakan masih bersifat konvensional, dimana pengalokasian dana hanya didasarkan pada proporsi kegiatan dan sistem plafon yang diusulkan oleh unit-unit di dalam institusi (*bottom-up system*). Sistem ini pada kondisi aktual menyebabkan distorsi penggunaan dana anggaran sehingga terjadi *over-absorption* maupun *under-absorption*. Hal tersebut berdampak pada inefisiensi operasional anggaran yang akan bermuara pada ketidakakuratan biaya pendidikan yang akan dikenakan pada mahasiswa melalui SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan) maupun DOP (Dana Operasional Pendidikan) mengingat salah satu komponen dana PNBPN tersebut akan memegang peranan strategis di masa mendatang.

Dengan adanya fakta-fakta diatas dimana pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sangat penting untuk diberlakukan pada seluruh instansi pendidikan negeri,

maka penelitian ini memfokuskan pada perancangan model Penerapan Uang Kuliah Tunggal melalui perhitungan *Unit Cost* (biaya satuan per mahasiswa) dengan pendekatan *Activity Based Costing* untuk menentukan harga pokok kegiatan pelayanan pendidikan program Sarjana (S-1) per unit (mahasiswa) pada setiap jurusan/program studi di lingkungan PTAN di Indonesia.

Penghitungan Uang Kuliah tunggal (UKT) yang berbasis *unit cost* dengan menggunakan sistem ABC ini, diharapkan mampu mengukur secara tepat dan akurat atas besaran tarif biaya per mahasiswa. Perhitungan *unit cost* tidak hanya pada biaya yang melekat pada masing-masing mahasiswa per jurusan saja, tetapi juga terhadap biaya gabungan yang diidentifikasi melalui aktivitas dengan satuan mahasiswa. Pada akhirnya tujuan dari hasil penelitian ini adalah memberikan suatu hasil konkret dalam penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang efektif pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Kementerian Agama

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul **“FINANCE’S KNOWLEDGE SHARING ; PERHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN) PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI .”**

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Merancang formulasi perhitungan biaya satuan per mahasiswa (*unit cost*) pada tingkat jurusan program Sarjana S-1.
2. Mengetahui besaran tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) per mahasiswa masing-masing jurusan/program studi.
3. Mengetahui besaran kebutuhan BOPTN pada kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang formulasi perhitungan biaya satuan per mahasiswa (*unit cost*) pada tingkat jurusan program Sarjana S-1.
2. Berapa besaran tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) per mahasiswa masing-masing jurusan/program studi.
3. Berapa besaran kebutuhan BOPTN pada PTKIN.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperjelas dan membatasi penelitian ini maka ditetapkan ruang lingkup penelitian berikut ini. Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data sekunder yang digunakan adalah data keuangan dengan sumber dana PNBPN, RKA-KL dan Laporan Keuangan. Data primer diperoleh dari observasi lapangan, *brainstorming* dengan pihak terkait dan kuesioner pembobotan.
2. Perhitungan standard *unit cost* dibatasi pada produk pendidikan/belajar-mengajar.

E. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian yang akan dicapai sebagai berikut ;

1. Bagi Kementerian Agama (kemenag) RI khususnya Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) Ditjen Pendidikan Islam penelitian ini bermanfaat untuk menentukan kebijakan dalam hal penentuan Uang Kuuliah Tunggal (UKT) dan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) bagi seluruh Perguruan Tinggi Islam Negeri serta sebagai acuan dalam mengajukan besaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) ke Kementeria Keuangan RI.
2. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini berguna untuk acuan serta landasan penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibebankan kepada mahasiswa melalui perhitungan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang telah dihitung secara sistematis, rasionil dan akuntabel.
3. Bagi Peneliti, sebagai bagian dari pengembangan keilmuan dan peningkatan kapasitas akademik peneliti serta berkontribusi terhadap problematika di Peguruan Tinggi Agama Islam khususnya dalam hal menentukan biaya satuan (*unit cost*) penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi mahasiswa starta-1 (S-1).

4. Bagi Masyarakat, penelitian memberikan gambaran nyata berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi mahasiswa dan berapa biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat dan negara secara proporsional, rasional berdasarkan azas keadilan dan keterbukaan.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan dan non keuangan yang dirumuskan untuk mencapai tahapan penelitian dan analisa sebagai berikut:

1. Telaah Aktivitas

- a. Mengidentifikasi semua aktivitas yang terjadi di dalam area cakupan ruang lingkup penelitian yakni PTKIN.
- b. Mengidentifikasi semua sumber daya (*resources*) yang dikonsumsi oleh organisasi (Jurusan, Fakultas dan Universitas/ Instiitusi dan Sekolah), baik yang berupa uang (dana anggaran), tenaga kerja, mesin/peralatan dan lainnya.
- c. Mengidentifikasi jumlah orang, jumlah peralatan dan jumlah perlengkapan, besar gaji, honor dan insentif dan lainnya (*resources driver*) untuk setiap komponen dihubungkan dengan aktivitas yang mengkonsumsinya pada Jurusan, Fakultas dan Universitas.
- d. Membebankan biaya ke aktivitas secara penuh sesuai dengan banyaknya *resources* yang dikonsumsi melalui *cost driver* yang telah dipilih dan relevan dengan aktivitas proses utama.

2. Telaah *Cost Object*

- a. Mengidentifikasi *Cost Object*
- b. Mengidentifikasi *Activity Driver*, misalnya jam penggunaan ruang, jumlah mahasiswa, luas gedung dan ruangan, pemakaian daya dan jasa untuk setiap aktivitas yang menyerap biaya penuh untuk menghubungkan aktivitas ke *Cost Object* yang dikonsumsinya.
- c. Membebankan biaya ke *Cost Object* secara penuh sesuai besarnya biaya yang dikonsumsi melalui *Activity Driver* di tiap Jurusan, Fakultas dan Universitas

3. Tahap Perancangan Model

- a. Identifikasi proses bisnis PTKIN meliputi proses manajerial, proses utama dan proses pendukung
- b. *Review* data keuangan di PTKIN meliputi Laporan Keuangan, data RKA-KL, data RPD Rencana Bisnis Anggaran untuk mengetahui mata anggaran yang ada, serta batasan penggunaannya.
- c. Mengidentifikasi dan membuat definisi aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan oleh Jurusan, Fakultas dan Universitas ke dalam *activity dictionary* atau rincian aktivitas yang mendefinisikan keseluruhan aktivitas yang mencerminkan proses manajerial, utama dan pendukungnya.
- d. Mengidentifikasi dan menetapkan *Cost Object*, *Direct Labor Cost*, *Direct Material Cost* dan *Overhead Cost*. Penetapan dimaksudkan untuk menyamakan persepsi pembaca dan menjelaskan acuan istilah tersebut dalam penelitian ini.
- e. Identifikasi *Expense Category*, *Cost Driver*, dan *Cost Component*.
- f. Penyusunan hirarki alokasi *Activity Overhead Cost* pada tingkat Jurusan, Fakultas dan Universitas/ Institut/ Sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan/mengestimasi proporsi biaya yang diserap, yaitu melalui proporsi yang besarnya ditentukan oleh *cost driver* yang telah diidentifikasi.

B. Data Dan Sumber Data

1. Metode Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Jurusan/Program Studi yang terdapat di PTKIN, yang terdiri atas:

1. Program Strata-1
2. Unit./Lembaga pendukung lainnya

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan penelitian lapangan yaitu langsung (*direct*) melalui metode wawancara dan permintaan data pada tiap Jurusan Strata-1 reguler, Fakultas dan Institut dan data sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan.

1. Penelitian Lapangan

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini berhubungan dengan data keuangan dan non keuangan IAIN Surakartayakni berupa RKA-KL (Rencana Kegiatan Anggaran- Kementerian/Lembaga), Rincian Penggunaan Dana (RPD), Laporan Keuangan dan identifikasi proses bisnis, *cost driver* untuk aktivitas-aktivitas yang teridentifikasi dan biaya aktivitas sesuai kegiatan terhadap mata anggaran. Data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data untuk tahun anggaran 2015.

Untuk memperoleh data primer, digunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. **Wawancara**, yakni melakukan permintaan data sekunder dan penggalian informasi kepada pimpinan dan pihak-pihak yang terkait atas data keuangan dan non keuangan. Proses ini dilakukan secara formal maupun non formal atas keterkaitan permintaan data yang dibutuhkan.
- b. **Observasi**, dilakukan observasi terhadap sifat, luas, dan karakteristik aktivitas yang ada di Jurusan, Fakultas dan Universitas yang berhubungan dengan pokok bahasan, sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan pada proses manajerial, proses utama dan proses pendukung sehingga dapat melakukan mapping terhadap *cost component* yang relevan bagi perhitungan *unit cost* jurusan/ mahasiswa Strata-1 Reguler di lingkungan PTAN di Indonesia.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan diperlukan untuk mengumpulkan data sekunder serta diperlukan untuk menunjang, melengkapi, dan menyempurnakan data primer. Teknik pengumpulan data sekunder adalah dengan cara mempelajari dari jurnal penelitian ilmiah, laporan-laporan dari instansi terkait serta karya tulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini, misalnya Akuntansi Biaya, *Activity Based Costing (ABC)* dan pengelolaan keuangan dan proses bisnis Perguruan Tinggi.

BAB III

KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi Biaya

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purposive activity*). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi (Mardiasmo, 2002).

Activity Based Costing yang selanjutnya disingkat menjadi ABC, merupakan suatu sistem informasi tentang pekerjaan atau aktivitas yang mengkonsumsi sumberdaya dan menghasilkan nilai bagi konsumen.

Definisi lainnya mengenai ABC, antara lain ABC adalah sistem akuntansi dan alokasi yang menelusuri biaya ke produk menurut aktivitas-aktivitas yang dilakukan terhadap produk, yang dimaksudkan untuk menghasilkan informasi biaya bagi keputusan strategis, perancangan dan pengendalian operasional.

Menurut Turney ABC sistem didefinisikan sebagai metodologi yang mengukur biaya dan kinerja aktivitas-aktivitas sumber daya dan obyek biaya. Sumber daya dibebankan ke aktivitas kemudian aktivitas dibebankan ke obyek biaya sesuai dengan penggunaannya.

Definisi tersebut mencakup suatu range informasi biaya dan informasi kinerja yang luas, tidak hanya tefokus pada *product costing* saja. *ABC system* dapat juga dijadikan alat manajemen dalam melahirkan *continous improvement*.

Model ABC yang berbasis pada definisi tersebut diatas mempunyai 2- sudut pandang yaitu:

1. *Cost Assignment View* (sudut pandang pembebanan biaya)

Sudut pandang ini ABC merefleksikan kebutuhan organisasi untuk membebankan biaya ke aktivitas dan obyek biaya (baik produk, jasa maupun konsumen) dan untuk menganalisis keputusan-keputusan yang diambil (misalnya dalam hal penetapan harga, bauran produk, perencanaan produk, perancangan produk dan lainnya).

Cost assignment view ini dibentuk dari beberapa *building block*, tiga yang utama adalah:

- a. Sumber daya, elemen-elemen ekonomi yang diarahkan ke kinerja aktivitas dan merupakan sumber biaya. Sumber daya dalam industry manufaktur meliputi tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, pendukung produksi, biaya tidak langsung produksi dan biaya-biaya diluar produksi. Sumber daya mengalir ke aktivitas yang merupakan proses atau prosedur yang menyebabkan kerja.
- b. Aktivitas, yang saling berhubungan berada didalam *activity center*. *Activity center* merupakan kumpulan aktivitas yang biasanya terkumpul menurut fungsi/proses. Berbagai macam faktor yaitu *resource driver* digunakan untuk membebankan biaya ke aktivitas. Faktor-faktor ini dipilih untuk

memperkirakan konsumsi sumberdaya oleh aktivitas. Setiap sumber daya yang dilacak ke aktivitas menjadi suatu elemen biaya dalam suatu *activity cost pool* dilacak ke obyek biaya melalui *activity drivers*

c. Obyek biaya, titik akhir pelacakan biaya.

Suatu obyek biaya adalah mengapa suatu kerja dilakukan dalam perusahaan, dan dapat berbentuk produk ataupun *customer*.

2. *Process view*

Sudut pandang ini ABC menyediakan informasi mengenai kerja yang telah dilakukan dalam suatu aktivitas dan hubungan antara kerja tersebut dengan aktivitas yang lain

Biaya jasa berdasar ABC dapat memberikan dasar yang layak dalam pengambilan keputusan, diantaranya keputusan untuk membeli atau membuat keputusan.

Fokus utama pada sistem ABC adalah pada aktivitas yang terjadi. Setiap aktivitas akan menimbulkan biaya dan biaya yang terjadi dapat dikelola melalui pengelolaan aktivitas. Pada sistem ini selalu terdapat hubungan kausal antara pemicu biaya dengan aktivitas. Sistem ABC merupakan sistem informasi biaya yang berdasarkan pada aktivitas yang terjadi dan memasukkan komponen konsumen ke dalam model sistem informasi biaya.

B. Syarat- syarat Penerapan ABC

Persyaratan dasar yang membuat pertimbangan diterapkan ABC adalah:

1. *Non unit based cost* mempunyai persentase yang signifikan dalam total *overhead cost*. Jika jumlah *unit based cost* tidak material, maka tidak menjadi masalah bagaimana pengalokasian ke *individual cost*.
2. *Rasio* konsumsi dari aktivitas *unit based cost* dan *non unit based cost* harus berbeda. Jika produk mengkonsumsi semua *overhead activities* dengan rasio yang kurang lebih sama, maka penggunaan *unit based cost driver* sebagai dasar pengalokasian biaya menjadi tidak masalah.

Jadi perusahaan dengan *product diversity* rendah dapat menggunakan sistem biaya tradisional tanpa masalah. Tetapi perusahaan dengan *unit based cost* signifikan dan *product diversity* tinggi pun belum tentu memerlukan ABC. ABC mensyaratkan 3 hal berikut agar pemanfaatannya menjadi lebih optimal.

1. Diversifikasi produk yang dihasilkan perusahaan tinggi. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk atau lini produk yang diproses dengan menggunakan beberapa fasilitas manufaktur yang sama. Dengan demikian akan timbul masalah untuk mengalokasikan atau membebankan sumberdaya yang dikonsumsi masing-masing produk.
2. Perusahaan menghadapi persaingan yang ketat. Informasi tentang harga pokok yang akurat akan lebih mendukung berbagai macam pengambilan keputusan manajemen untuk berkompetisi.
3. Biaya pengukuran relatif rendah. Biaya-biaya pengukuran untuk menghasilkan informasi biaya aktivitas relatif rendah dibandingkan dengan manfaat yang akan

diperoleh dari penerapan sistem tersebut di masa yang akan datang.

C. Konsep Dasar ABC Sistem

Anggapan yang mendasari konsep ABC adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan menimbulkan biaya ABC berangkat dengan anggapan bahwa sumber daya pembantu atau sumber daya tidak langsung menyediakan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan, bukan sekedar menyebabkan timbulnya biaya yang harus dialokasikan.
2. Produk menyebabkan timbulnya permintaan dan kegiatan. Untuk membuat produk diperlukakn berbagai kegiatan, dan setiap kegiatan memerlukan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dengan konsep dasar ABC tersebut, biaya merupakan konsumsi sumber daya (seperti bahan baku, sumber daya manusia, tekhnologi, modal) dihubungkan dengan kegiatan yang mengkonsumsi sumber daya tersebut. Dengan demikian hanya dengan mengelola dengan baik kegiatan untuk menghasilkan produk dan jasa, manajemen akan mampu membawa perusahaan unggul dalam persingan jangka panjang. Untuk mampu mengelola kegiatan perusahaan, manajemen memerlukan informasi biaya yang mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai kegiatan perusahaan.

Pada awal pengembangannya ABC digunakan dalam perusahaan-perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai macam produk dengan biaya overhead tinggi. Dalam merancang ABC, kegiatan untuk memproduksi dan

menjual produk dalam perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk dapat digolongkan ke dalam 4 macam kelompok besar yaitu:

1. *Facility Sustaining Activity Cost* Biaya ini berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki perusahaan. Biaya depresiasi dan amortisasi, biaya asuransi, biaya gaji karyawan kunci perusahaan adalah contoh jenis biaya yang termasuk dalam *facility sustaining activity cost*. Biaya dibebankan kepada produk atas dasar taksiran unit produk yang dihasilkan kapasitas *activity cost*.
2. *Product Sustaining Activity Cost* Biaya ini berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk tertentu dan biaya-biaya untuk mempertahankan produk untuk tetap dapat dipasarkan. Biaya ini tidak terpengaruh oleh jumlah unit yang diproduksi dan jumlah *batch* produksi yang dilaksanakan oleh divisi penjual. Contoh biaya ini adalah biaya desain produk, desain proses pengolahan produk, pengujian produk, biaya ini dibebankan kepada produk atas dasar taksiran jumlah unit produk tertentu yang akan dihasilkan selama umur produk tertentu (*product life cycle*).
3. *Batch Activity Cost*
Biaya ini berhubungan dengan jumlah *batch* produk yang diproduksi. Setiap *cost* yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan mesin dan peralatan sebelum suatu order produksi diproses adalah contoh biaya yang termasuk dalam golongan biaya ini, besar kecilnya biaya ini tergantung dari frekuensi order produksi yang diolah oleh fungsi produksi. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang diproduksi dalam

setiap order produksi. Pembeli dibebani *batch activity cost* berdasarkan jumlah *batch activity cost* yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam setiap menerima order dari pembeli.

4. *Unit Level Activity Cost*

Biaya ini dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah unit produk yang dihasilkan. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya energi, biaya angkutan adalah contoh biaya yang termasuk dalam golongan ini, biaya ini dibebankan kepada produk berdasarkan jumlah unit produk dikalikan dengan jumlah produk yang sesungguhnya diperoleh.

D. Manfaat ABC

ABC juga menekankan bahwa produk-produk atau jasa yang dihasilkan tidak secara langsung menyerap sumber daya, tetapi menyerap aktivitas-aktivitas. Aktivitas-aktivitas inilah yang secara langsung mengkonsumsi sumber daya. Menurut Cooper, ABC bertujuan sebagai berikut:

1. Memperbaiki mutu pengambilan keputusan

Dengan informasi biaya produk yang lebih teliti, kemungkinan manajemen melakukan pengambilan keputusan dengan resiko yang lebih kecil, informasi biaya produk yang lebih teliti sangat penting artinya bagi manajemen jika perusahaan menghadapi persaingan yang sangat tajam.

2. Kemungkinan manajemen melakukan perbaikan terus menerus terhadap kegiatan untuk mengurangi biaya overhead.

ABC mengidentifikasi biaya overhead dengan kegiatan yang menimbulkan biaya tersebut. dengan demikian informasi biaya yang dihasilkan oleh ABC dapat digunakan oleh manajemen untuk memantau secara terus menerus berbagai kegiatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan melayani konsumen. Perbaikan berbagai kegiatan untuk menghasilkan produk dan penghilangan kegiatan yang tidak menambah nilai bagi konsumen dapat dipertimbangkan oleh manajemen bedasar informasi biaya yang disajikan dengan sistem ABC.

3. Memberikan kemudahan dalam penentuan biaya relevan. Karena ABC menyediakan informasi biaya yang dihubungkan dengan berbagai kegiatan untuk menghaslkan produk, maka manajemen akan memperoleh kemudahan dalam memperoleh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai kegiatan bisnis mereka. Misalnya manajemen mempertimbangkan untuk melakukan perbaikan dalam kegiatan set up fasilitas produksi, ABC dengan cepat mampu menyediakan informasi *batch related activities*, sehingga memungkinkan manajer mempertimbangkan akibat keputusan mereka terhadap konsumsi sumber daya untuk kegiatan tersebut.

E. Kendala-kendala Penerapan ABC

Adanya kerancuan bahwa manajemen yang menggunakan ABC menganggap produknya bisa lebih bersaing karena informasi biaya lebih akurat. ABC memang merupakan alat yang dapat digunakan manajemen dalam memperbaiki daya saing.

Sebenarnya yang harus dilakukan adalah memmanage aktivitas, bukan biaya. Sebab jika hanya sekedar memmanage biaya, bisa saja aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah (*non value added*) yang biasanya tinggi, manajemen bukannya berusaha meniadakan aktivitas tersebut, tetapi malah memotong biaya secara kesluruhan, pandangan bahwa ABC dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif adalah hal yang berbahaya dan untuk menghindarinya sejak awal manajemen harus mengelola aktivitas bukannya biaya.

Manajemen perlu menyadari apakah sistem manajemen biaya dengan ABC ini memberikan informasi biaya yang benar-benar merupakan biaya produksi. Tiga kendala dari biaya produksi yang dilaporkan berdasar ABC adalah:

a. Alokasi

Walaupun data aktivitas penting diperoleh, tetapi beberapa biaya masih memerlukan alokasi biaya yang bersarkan volume. Misalnya biaya-biaya yang berhubungan dengan gedung yaitu biaya sewa, asuransi dan paja bangunan. Usaha-usaha untuk menelusuri aktivitas-aktivitas penyebab biaya ini merupakan tindakan yang sia-sia dan tidak praktis.

b. Biaya pengukuran yang tinggi

ABC memerlukan biaya pengeluaran yang tinggi untuk mengoperasikan sistem ini. Kebanyakan perusahaan hanya punya sedikit activity center untuk memulainya yang sama untuk pengelompokan activity center.

c. Periode-periode akuntansi

Periode-periode waktu yang arbitrer masih digunakna dalam menghitung biaya-biaya. Banyak manajer yang ingin mengetahui apakah produk yang dihasilkan

mengunutkan atau tidak. Tujuannya tidak saja untuk mengukur seberapa banyak biaya yang sudah diserap oleh produk tersebut, tetapi juga mengukur segi kompetitifnya dengan produk sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Manajemen dalam hal ini memerlukan pengukuran dan pelaporan yang interim. Informasi untuk mengevaluasi perilaku aktivitas biaya tersebut dapat diberikan pada saat siklus hidup produk itu berakhir sehingga untuk pengukuran produk yang dimiliki siklus hidup lebih lama membutuhkan bentuk pengukuran yang interim (sementara).

Selain kendala-kendala tersebut diatas, kendala-kendala yang timbul dalam penerapan ABC adalah:

- a. Banyak perusahaan yang belum secara ekstensif terotomatisasi sehingga manajer merasa belum perlu mengganti sistem akuntansi biaya tradisional untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan manufaktur tersebut.
- b. Pelaksanaan otomatisasi dilaksanakan secara bertahap sehingga para manajer hanya memusatkan perhatian pada proses produksi.
- c. Kegiatan operasional secara otomatis dan manual dilakukan bersamaan tetapi sistem akuntansi biaya tradisional disediakan bagi keduanya.
- d. Para manajer sering berpendapat bahwa yang utama adalah pelaksanaan produksi, urutan kertas kerja belakangan.
- e. Kebutuhan, pelaporan eksternal mendorong akuntansi keuangan dipakai juga untuk tujuan akuntansi manajemen internal karena pusat perhatian sering diarahkan untuk mempersiapkan laporan keuangan eksternal, dengan demikian banyak manajer

meras tidak ada waktu untuk mengubah bentuk laporan manajemen biaya dengan bentuk baru yang lebih relevan.

- f. Keterbatasan sumber daya untuk melaksanakan sistem akuntansi manajemen biaya yang baru.
- g. Para manajer sering bertahan untuk tidak berubah karena konflik antar manajer.

F. Activity-Based Costing Untuk Pemerintah

Activity-Based costing banyak diterapkan pada perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Dalam penelitian ini akan dikembangkan penerapan ABC untuk organisasi sektor publik yang dalam hal ini diambil organisasi pemerintahan.

Pemerintah sebagai organisasi yang tidak berorientasi mengejar laba sebenarnya dapat menerpakan ABC. Penerapan ABC pada sektor publik berbeda dibandingkan penerapan ABC sektor privat, hal ini disebabkan karakteristik kegiatan pemerintah sedikit berbeda dibandingkan organisasi swasta pada umumnya. Karakteristik aktivitas pemerintah daerah sebenarnya hampir mirip dengan perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang kadangkala menimbulkan kesulitan, misalnya karakteristik output yang sulit didefinisikan tidak terwujud. Selain itu, biaya kapasitas gabungan mewakili sebagian besar proporsi dari total biaya dan sukar untuk dikaitkan dengan aktivitas yang menghasilkan output, sebagai contoh, biaya yang dikeluarkan oleh rektorat terkait wisuda mahasiswa, alokasi biaya untuk kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas, yang mana membutuhkan penelusuran untuk menghitung *unit cost* per mahasiswa per jurusan.

Menurut Mark D. Abrahams dalam tulisannya yang berjudul *Activity Based Costing: Illustrations from the State of Iowa* menyatakan bahwa *Activity Based Costing* dalam lingkungan pemerintahan telah dilakukan di negara bagian Iowa.

Konsep ABC serta langkah-langkahnya dianggap dapat diterapkan dalam lingkungan pemerintahan. *Activity Based Costing* telah membuktikan bahwa sistem ini merupakan alat manajemen yang handal pada kinerja sistem manajemen negara bagian Iowa dengan menyediakan informasi biaya yang penting. Manajer negara bagian Iowa menganjurkan menggunakan pendekatan ini untuk penentuan pelepasan pemerintah dengan menjalankan metode "keep it simple" untuk mencapai pembiayaan yang spesifik dengan pencapaian yang minimum dan kerumitan yang tidak terlalu banyak dalam metode penentuan biaya. Metode ini memungkinkan program secara tersendiri untuk dikerjakan dengan biaya tersendiri untuk menghubungkan antara biaya dan data program untuk tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penyampaian pelayanan masyarakat.

Ada 4 langkah dasar untuk mengimplementasikan sistem ABC. Pertama, sumber daya dan biaya harus terorganisasi dalam bentuk biaya unit kerja. Kedua, biaya perlu dikategorikan kedalam kategori berpengaruh secara langsung atau tidak langsung tersebut terhadap aktivitas. Untuk biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan aktivitas, sebuah metode indirect cost perlu untuk dipilih, apakah dengan menggunakan KIS (Keep it simple) ataukah dengan metode *full cost*. Ketiga, *direct cost* dan *indirect cost* perlu untuk ditunjukkan atau dialokasikan kepada aktivitas yang spesifik. Dan terakhir, *Unit Cost* dihitung dengan memisahkan biaya aktivitas dengan *activity output*.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Masyhudi (2008) dengan judul “Analisis Biaya Dengan Metode *Activity Based Costing* Kepaniteraan Klinik Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unissula Di Rumah Sakit Pendidikan” yang bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya satuan (*Unit Cost*) dan menetapkan besarnya biaya pendidikan kepaniteraan klinik yang akan diusulkan berlaku di Rumah Sakit Islam Sultan Agung sebagai Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Unissula. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Unit Cost* biaya kepaniteraan klinik per bagian pada bagian besar adalah Rp. 1.874.694,-. Hasil ini lebih tinggi dari biaya Kepaniteraan Klinik yang ditetapkan saat ini yaitu sebesar Rp. 1.450.000,-. Terdapat kenaikan sebesar Rp. 424.694,- atau sebesar 29,3 %. Sedangkan *Unit Cost* biaya Kepaniteraan Klinik per bagian untuk Bagian Kecil adalah Rp. 1.004.766,- Hasil ini lebih tinggi dari biaya yang saat ini ditetapkan yaitu sebesar Rp 950.000,-. Terdapat kenaikan Rp. 54.766,- atau sebesar 5,7 %.

Yoyon Bahtiar Irianto dalam tulisannya yang berjudul “Analisis Biaya Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)” mengemukakan bahwa *cost driver* sebenarnya merupakan *cost pool* dan *cost object*. *Cost object* adalah jasa tempat biaya dibebankan untuk mencapai tujuan-tujuan penyelenggaraan program. Sedangkan *cost pool* merupakan pengelompokan biaya-biaya individual ke dalam kelompok tertentu (Blocher, et.al, 1999). Terdapat dua kategori biaya yang perlu dicermati dalam melakukan perhitungan biaya yaitu biaya langsung dan tak langsung. Biaya langsung dapat ditelusuri secara langsung ke *cost pool* atau ke *cost*

object. Secara mudah dan dapat dengan segera dihubungkan secara ekonomi. Misalnya biaya alat belajar dapat dengan mudah ditentukan secara ekonomi. Demikian pula dengan biaya perlengkapan. Sebaliknya dalam biaya tak langsung, tidak dapat ditelusuri secara mudah, misalnya biaya supervisi terhadap kegiatan perencanaan KBM. Hal ini disebabkan karena biasanya biaya tak langsung merupakan gabungan dari beberapa aktivitas yang terdapat dalam beberapa *cost pool* atau *cost object*. Jika biaya tak langsung sulit ditelusuri maka harus dilakukan “dasar alokasi” sebagai cara pembebanannya, misalnya biaya tutor merencanakan KBM dengan dasar alokasi berapa kali kegiatan perencanaan tersebut dilakukan sehingga dapat dihitng berapa satu kali perencanaan perlu dirupiahkan. Cara pembebanan biaya seperti itu pembebanan dana dengan *cost driver*.

Aestikani Mahani (2008) dalam penelitiannya Perancangan Model ABC untuk menentukan standar *Unit Cost* pendidikan program studi s-1 (studi kasus: jurusan statistik-ITS) menjelaskan bahwa penelitian diawali dengan mereview sistem akuntansi perguruan tinggi, penetapan asumsi model, identifikasi proses bisnis dan aktivitas di jurusan statistik sebagai pilot project, identifikasi cost component tiap aktivitas, penentuan *cost driver*, dan mengalokasikan overhead cost ke masing-masing aktivitas serta menghitung besarnya total cost dan variansi antara metode existing terhadap metode ABC. Hasil penelitiannya menunjukkan besarnya biaya per unit yang diperoleh dengan metode ABC adalah sebesar Rp3.399.323, sedangkan dari metode traditional costing adalah sebesar Rp3.550.948. Sehingga dalam kesimpulan penelitiannya disebutkan bahwa terjadi *overcosting* dengan variansi (selisih biaya) sebesar Rp115.625 per unit.

H. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan metode *ABC costing* seperti yang dilakukan dalam penelitian terdahulu, terutama merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Aestikani Mahani (2008), namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni antara lain:

1. Penelitian Aestikani hanya menghitung biaya layanan pendidikan satu jurusan, yakni jurusan statistik di ITS, sedangkan penelitian ini mengukur cluster prodi di berbagai bentuk perguruan tinggi keagamaan negeri..
2. Penelitian terdahulu melakukan analisa variansi atas *ABC costing* dan *traditional costing*, namun penelitian ini hanya mengukur biaya layanan menggunakan *ABC costing*.

Jurusan, Fakultas dan Rektorat. Di lihat dalam kertas kerja untuk UIN dan IAIN berbeda dengan kertas kerja untuk STAIN.

e. Perhitungan dengan Metode Activity Based Costing

a) Estimasi Biaya Proporsi dan Keterkaitan Aktivitas Terhadap Cost Component Melalui proporsi Cost Driver

Langkah perhitungan dengan metode Activity Based Costing (ABC) adalah dengan mengstimasi biaya proporsi yang dikeluarkan oleh Jurusan, Fakultas dan Rektorat secara proporsional sesuai dengan pertimbangan pelaksana anggaran di masing-masing PTKIN. Porsi pembebanan biaya ini khususnya pada biaya overhead untuk fakultas dan rektorat. Selanjutnya prosi masing-masing biaya dihitung baik yang terkait dengan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead yang dihitung dengan pemicu biaya (cost driver). Secara rinci dalam kertas kerja dapat dijelaskan dengan jelas, namun untuk gambaran dapat dilihat dalam contoh proporsi biaya dalam tabel di bawah ini :

BAB IV PEMBAHASAN

I. Identifikasi Data Penghitungan

1. Urgensi Perhitungan Biaya Satuan Pendidikan Dalam Konteks Biaya Kuliah Tunggal (BKT), Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

Perhitungan biaya satuan merupakan hal yang strategis untuk dikaji di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Beberapa alasan di antaranya adalah *pertama*, selama ini belum ada satupun PTKIN yang memiliki hitungan secara jelas dan akuntabel tentang biaya penyelenggaraan pendidikan yang harus dikeluarkan dalam proses pendidikan setiap mahasiswa dalam 1 tahun. Perhitungan yang selama ini digunakan masih bersifat tradisional yakni menghitung total anggaran dibagi jumlah mahasiswa. Kelemahan metode ini adalah tidak mencerminkan aktivitas-aktivitas yang seharusnya dibiayai dalam pendanaan pendidikan. *Kedua*, perhitungan biaya satuan dapat digunakan dalam menentukan kebijakan anggaran khususnya bagi Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) Kementerian Agama RI. Kebijakan yang terkait seperti dalam hal distribusi anggaran, alokasi pembiayaan program unggulan, pembebanan biaya bagi masyarakat (SPP Mahasiswa) dan lain sebagainya. Adanya perhitungan biaya satuan akan memberikan gambaran nyata sehingga kebijakan dan program akan sesuai visi dan misi pendidikan tinggi yang tepat. *Ketiga*, amanat Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi mensyaratkan adanya perhitungan

Biaya Kuliah Tunggal (BKT) sebagai syarat penerimaan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) yang diberikan pemerintah bagi tambahan operasional Perguruan Tinggi. Alokasi BOPTN juga mensyaratkan adanya pemberlakuan Uang Kuliah Tungga (UKT) yang dibebankan kepada masyarakat (mahasiswa) sebagai dasara pertimbangan alokasi BOPTN.

Saat ini PTKIN di Indonesia berjumlah 53 Perguruan Tinggi baik yang berstatus Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Setiap lembaga dengan statusnya memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Pertimbangan perhitungan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) memperhatikan beberapa hal yang relevan untuk dipertimbangkan dan memiliki urgensi untuk dijadikan pembeda dalam perhitungan Biaya Kuliah Tunggal seperti status kelembagaan, predikat atau nilai akreditasi lembaga dan program studi, indeks kemahalan dan lain sebagainya. Pertimbangan dan alasan inilah yang akan membedakan dalam perhitungan BKT dan distribusi BOPTN di masing-masing Perguruan Tinggi.

Sejak tahun 2012, PTKIN telah menerima dana BOPTN sebagaimana amanah Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 76 ayat 1 dan 3 (tentang UKT), Pasal 88 ayat 1, 2, 3, 4 (tentang UKT dan BKT) dan ayat 5 (tentang BOPT). Pelaksanaan UKT baru diterapkan pada tahun 2013 melalui PMA No. 96 Tahun 2013 tentang BKT - UKT bagi mahasiswa baru PTAN di lingkungan Kemenag tahun Akademik 2013/2014. Untuk itu, perlu segera dibuatkan formulasi perhitungan UKT, BKT dan BOPTN yang akuntabel agar

implementasi Undang-Undang dan PMA dapat berjalan dengan efektif dan akuntabel. Sebagai rujukan atas implementasi Undang-Undang dan Peraturan tersebut, PTKIN di bawah Kementerian Agama menggunakan Permendikbud No 58 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) yang kemudian direvisi melalui Permendikbud No 108 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Permendikbud No 58 Tahun 2012 tentang BOPT. Peraturan yang dikeluarkan Kemendikbud selanjutnya dimodifikasi secara komprehensif dengan memperhatikan kondisi dan realita yang ada dalam PTKIN. Tanpa pertimbangan yang ada dalam PTKIN, maka formulasi Permendikbud akan banyak menyebabkan kendala dalam perhitungan distribusi BOPTN dan pemberlakuan UKT di lingkungan PTKIN. Perbedaan status kelembagaan, karakteristik dan tipologi civitas akademika serta karakteristik program studi antara Perguruan Tinggi di bawah Kemendikbu dan Kementerian Agama sangatlah berbeda dalam banyak hal. Inilah yang menjadikan, upaya modifikasi dan revisi formula sangat urgen untuk dilaksanakan.

2. Formulasi Perhitungan Biaya Satuan (Unit Cost)

a. Identifikasi Bisnis Utama (*core business*) Perguruan Tinggi

Langkah pertama dalam perhitungan biaya satuan (unit cost) adalah dengan mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang ada dalam setiap proses di Perguruan Tinggi. Beberapa proses yang terjadi dalam aktivitas di Perguruan Tinggi dibagi ke dalam tiga kategori yakni aktivitas atau proses manajerial yakni aktivitas yang terkait dengan tata kelola Sumber Daya

Manusia (SDM), kepemimpinan, keuangan dan tata kelola organisasi dan hukum, kedua adalah aktivitas atau proses utama yakni aktivitas yang terkait dengan kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ketiga adalah aktivitas atau proses pendukung, yakni aktivitas yang berkaitan dengan support system seperti ketersediaan Information Technology (IT), aplikasi dan sistem operasional dan lain sebagainya.

Secara umum ketiga proses tersebut dapat diuraikan dalam konteks tatakelola organisasi dan kerja (ortaker) Perguruan Tinggi sebagai berikut

a) Proses Manjerial

Dalam proses manajerial, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sangat tergantung dengan ORTAKER yang dimiliki. Setiap PTKIN memiliki ortaker yang berbeda antara satu dengan lainnya sehingga setiap aktivitas yang dihasilkan dari proses manajerial akan berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Secara umum, dalam PTKIN ada Rektor/Ketua, Wakil Rektor/Wakil Ketua, Kepala Biro (eselon II), Kepala Bagian (Eselon III), Kepala sub-bagian (eselon IV), Ketua lembaga-lembaga, Ketua Pusat-Pusat (Unit Pelaksana Teknis) dan dibantu oleh para staf/karyawan dibawahnya.

b) Proses Utama

Adapun proses utama merupakan segala aktivitas yang berkaitan dengan tugas utama Perguruan Tinggi yang tertuang dalam Trihrama Perguruan tinggi yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat . Kegiatan Pendidikan meliputi seluruh aktivitas akademik mulai pengenalan

kampus, kuliah umum, perkuliahan, praktikum, kuliah kerja nyata, ujian-ujian, penelitian (skripsi), munaqasyah hingga wisuda. Seluruh aktivitas akademik setiap PTKIN berbeda-beda namun memiliki jenjang yang sama. Selanjutnya kegiatan penelitian yang diperuntukkan bagi dosen, mahasiswa, tenaga fungsional dan lain sebagainya merupakan salah satu tugas utama yang dimulai dari penyusunan proposal, review proposal, pelaksanaan penelitian, evaluasi hingga penyampaian hasil penelitian.

c) Proses Pendukung

Proses pendukung meliputi segala aktivitas yang terkait dengan support system seperti pemenuhan kebutuhan IT, aplikasi-aplikasi pendukung aktivitas akademik seperti SIAKAD dan lain sebagainya. Terkait dengan identifikasi tersebut, setiap PTKIN merumuskan aktivitas-aktivitas apa yang dimiliki yang berhubungan dengan proses manajerial, proses utama dan proses pendukung. Setiap PTKIN menyusun aktivitas-aktivitas tersebut sehingga mudah untuk merumuskan kegiatan-kegiatan dalam Perguruan tinggi tersebut. Dalam penelitian ini beberapa PTKIN yang telah dimasukkan data-data terkait dalam aplikasi yang telah ada dan dibuat oleh tim peneliti.

b. Identifikasi Cost Object dan Activity Center 48 aktivitas.

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi cost object yakni mengidentifikasi Biaya Langsung (direct cost), Biaya tidak Langsung (Indirect

cost) berdasarkan aktivitas tersebut. Setiap aktivitas dalam setiap proses, pasti memiliki komponen biaya yakni biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung biasanya yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan atau aktivitas tersebut seperti biaya tenaga kerja, biaya bahan baku dan biaya overhead yang ada di jurusan .

Penentuan aktivitas utama (activity center) merupakan langkah untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang lazim dilakukan oleh setiap PTKIN. Dalam hal ini peneliti mengidentifikasi 48 aktivitas yang telah disesuaikan dengan Badan Standar Nasional Perguruan Tinggi (BSNP) yang digunakan dalam penilaian akreditasi baik akreditasi kelembagaan maupun akreditasi program studi. Aktivitas yang dimaksud diidentifikasi oleh peneliti selanjutnya setiap PTKIN mengisi biaya yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan di masing-masing PTKIN. Adapun secara rinci 48 aktivitas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 :
Identifikasi 48 Aktivitas (Activity Center)
Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

NO	NAMA AKTIVITAS
1	Penyusunan rencana 5 Tahunan (renstra)
2	Penyusunan dan penyebarluasan kebijakan strategis dan garis besar rencana kegiatan tahunan
3	Penyusunan laporan popularisasi jurusan
4	Perumusan kebijakan penjaminan mutu jurusan
5	Kegiatan Kemahasiswaan
6	Kegiatan Seleksi Mahasiswa baru
7	Persiapan dan pelaksanaan UTS/UAS
8	Kegiatan Orientasi Mahasiswa Baru
9	Penyusunan Kalender Akademik

10	Penyusunan Jadwal kuliah
11	Perencanaan Kuliah (PA)
12	Persiapan perkuliahan (pertemuan dosen)
13	Pelaksanaan kuliah
14	Pembuatan soal dan koreksi (vakasi) Ujian Masuk
15	Pengawas (vakasi) Ujian Masuk
16	Kuliah umum/Dosen tamu/Dosen Tidak Tetap
17	Pelayanan perpustakaan
18	Pemeliharaan Koleksi Perpustakaan
19	Praktikum
20	Praktek lapangan /PKL/PPL/P2KT
21	KKS/KKN
22	Tugas akhir/Skripsi
23	Ujian-ujian lainnya
24	Kegiatan Yudisium
25	Penyelenggaraan Wisuda
26	Pemeliharaan Gedung
27	Pemeliharaan peralatan mesin berupa AC, komputer, kendaraan dll
28	Pemeliharaan Alat lab
29	Pemeliharaan lingkungan
30	Pemeliharaan lift
31	Pemeliharaan jaringan
32	Keamanan
33	Pelayanan Kesehatan
34	Aktivitas umum: listrik, air, telepon dan layanan ICT,dll
35	Kegiatan keagamaan dan peningkatan bahasa mahasiswa baru lainnya (Asrama Mahasiswa)
36	Evaluasi Kurikulum dan Materi Perkuliahan Jurusan
37	Kegiatan Promosi dan Pameran
38	Penyusunan Kurikulum dan SAP Perkuliahan
39	Bantuan Studi Mahasiwa (Beasiswa)
40	Pelaksanaan, evaluasi dan Pelaporan Barang dan Jasa
41	Investasi alat-alat perkuliahan (biaya penyusutan)
42	Pembinaan pengembangan karir mahasiswa dan alumni
43	Pengembangan Sumber Daya Manusia
44	Dana Penelitian
45	Kegiatan pengembangan akademik dan administrasi lainnya
46	Remunerasi dan Gaji
47	Pengabdian masyarakat

c. Identifikasi Aktivitas Cost Pool , Cost Object dan Cost Driver pada Activity Center

Setelah ditentukan aktivitas-aktivitas yang ada dalam setiap proses, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi aktivitas cost pool, yakni menentukan unit kerjamana yang seharusnya mengerjakan aktivitas tersebut. Sebagai contoh adalah penyusunan Rencana Strategis (renstra), tentunya aktivitas ini adalah kewajiban bagi Perguruan tinggi (rektorat) dan Fakultas, bukan dibebankan kepada jurusan atau program studi. Dengan adanya cost pool ini, perhitungan biaya satuan dapat dihasilkan secara cermat dan akuntabel.

Setelah diketahui apa aktivitas yang dibebankan pada unit-unit tertentu, maka akan kelihatan berapa biaya (cost object) dari setiap unit. Selanjutnya, seluruh biaya dari setiap aktivitas pada unit-unit kerja dimasukkan datanya dalam karta kerja (telampir) untuk mengetahui besaran biaya yang ditimbulkan. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi cost driver sebagai penghitung atau pemicu biaya dari setiap aktivitas. Secara rinci cost driver yang dibutuhkan dalam penghitungan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2 :
Cost Driver Dalam Perhitungan Unit Cost
Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

FAKULTA : Fakultas A
 JURUSAN : Jurusan/Prodi A

No	Nama Cost Driver	Porsi
1	Jumlah Pagu per Fakultas	
2	Jumlah Mahasiswa per Fakultas	
3	Jumlah Mahasiswa per Jurusan	
4	Jumlah Kegiatan Kemahasiswaan per Fakultas	
5	Jumlah Kegiatan Kemahasiswaan per Jurusan	
6	Jumlah Kuliah umum/Stadium General per Fakultas	
7	Jumlah Mahasiswa Baru per Fakultas	
8	Jumlah Mahasiswa Baru per Jurusan	
9	Jumlah Mata Kuliah Per Fakultas	
10	Jumlah Mata Kuliah Per Jurusan	
11	Jumlah Fakultas	
12	Jumlah Jurusan	
13	Jumlah dosen per fakultas	
14	Jumlah Dosen per Jurusan	
15	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan	
16	Jumlah Mata Kuliah Praktikum Fakultas	
17	Jumlah Mata Kuliah Praktikum Jurusan	
18	Jumlah Kegiatan Praktek lapangan/PKL/PPL/P2KT Fakultas	
19	Jumlah Kegiatan Praktek lapangan/PKL/PPL/P2KT Jurusan	
20	Jumlah Mahasiswa KKS/KKN di Fakultas	
21	Jumlah Mahasiswa KKS/KKN di Jurusan	
22	Jumlah Wisudawan 1 tahun per fakultas	
23	Jumlah Wisudawan 1 tahun per jurusan	
24	Luas Bangunan per fakultas	
25	Jumlah Alat Laboratorium Fakultas	
26	Jumlah Alat Laboratorium Jurusan	
27	Jumlah lift yang ada di fakultas	
28	Jumlah Mahasiswa Asrama per fakultas	
29	Jumlah Mahasiswa Asrama per Jurusan	
30	Jumlah Mahasiswa penerima beasiswa per fakultas	
31	Jumlah Mahasiswa penerima beasiswa per jurusan	
32	Jumlah Pagu Belanja Modal Fakultas	
33	Jumlah Wisudawan dan Mahasiswa Fakultas	
34	Jumlah Wisudawan dan Mahasiswa Jurusan	

35	Jumlah Dosen yang melakukan penelitian selama setahun di fakultas	
36	Jumlah Dosen yang melakukan penelitian selama setahun di Jurusan	
37	Jumlah Karyawan dan Dosen Fakultas	
38	Jumlah Karyawan dan Dosen Jurusan	

JUMLAH MAHASISWA JUR

d. Identifikasi Biaya per Aktivitas sesuai dengan cost Component (Direct labor, Direct material dan Overhead)

Dalam proses perhitungan biaya satuan (unit cost) dengan metode Activity Based Costing diperlukan rincian komponen biaya dari setiap aktivitas. Hal ini digunakan untuk menghitung secara detail berapa biaya bahan baku langsung yang digunakan dan berapa biaya tenaga kerja langsung yang akan dikeluarkan. Dari 48 aktivitas di atas, ditentukan berapa biaya tenaga kerja langsung, berapa biaya bahan baku langsung dan berapa biaya overhead. Setiap aktivitas harus dijelaskan secara rinci biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing unit kerja baik dari rektorat, fakultas maupun jurusan.

Ada beberapa perbedaan pembebanan biaya dan porsi pembebanan antara PTKIN yang berstatus UIN, IAIN dengan STAIN. Perbedaan tersebut karena perbedaan struktur organisasi dimana STAIN tidak memiliki Fakultas sebagaimana UIN dan IAIN sehingga pembebanan biaya dan porsi biaya dibebankan antara jurusan dan Rektorat langsung. Sedangkan di UIN dan IAIN, pembebanan biaya dan porsinya dibebankan secara proporsional dengan

Tabel 3 :
Contoh Kertas Kerja Perhitungan Porsi Pembebanan Biaya Unit Cost
Pada Perguruan Tinggi KeAgamaan Islam Negeri

NO	AKTIVITAS	BIAYA TIDAK LANGSUNG (BTL)												TOTAL BIAYA
		BIAYA UNIVERSITAS			BIAYA JURUSAN									
		BB, BTK, dan Oh Universitas			Biaya Bahan Jurusan			Biaya Tenaga Kerja Jurusan			Overhead Jurusan			
		Biaya	Porsi (%)	Jumlah	Biaya	Porsi (%)	Jumlah	Biaya	Porsi (%)	Jumlah	Biaya	Porsi (%)	Jumlah	
3	4	5	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						(11 x 12)			(14 x 15)			(17 x 18)	(13 + 16 + 19)	
1	Penyusunan rencana 5 Tahunan (renstra)		0.00%	-		0.00%	-		0.00%	-		0.00%	-	-
2	Penyusunan dan penyebutan kebijakan strategis dan garis besar rencana kegiatan tahunan		0.00%	-		0.00%	-		0.00%	-		0.00%	-	-
3	Penyusunan laporan popularisasi jurusan		0.00%	-		0.00%	-		0.00%	-		0.00%	-	-

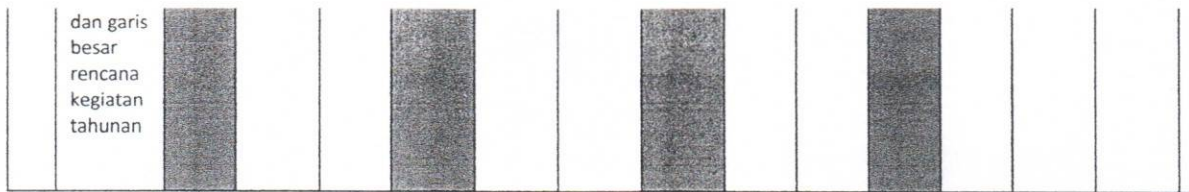
b) Pengalokasian Activity Overhead Cost Pada Masing-Masing Aktivitas Pada pada Setiap Jurusan

Perhitungan selanjutnya dalam metode ABC adalah pengalokasian biaya overhead aktivitas pada masing-masing aktivitas dalam setiap jurusan .
 Pembebanan biaya overhead Rektorat atau universitas ke jurusan karena banyak aktivitas yang tidak langsung dilakukan oleh universitas yang berhubungan dengan aktivitas jurusan seperti layanan kepegawaian, layanan keuangan dan lain sebagainya.

**Tabel 4 :
 Contoh Kertas Kerja Perhitungan Pembebanan Biaya Overhead Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri**

PERHITUNGAN UNIT COST

NO	AKTIVITAS	OVERHEAD UNIVERSITAS			BIAYA JURUSAN										TOTAL BIAYA
		Universitas ke Jurusan			DIRECT MATERIAL JURUSAN			DIRECT LABOUR JURUSAN			OVERHEAD JURUSAN				
		Biaya	Porsi (%)	Jumlah	Biaya	Porsi (%)	Jumlah	Biaya	Porsi (%)	Jumlah	Biaya	Porsi (%)	Jumlah		
1	2	3	4	5 (3 x 4)	11	12	13 (11 x 12)	14	15	16 (14 x 15)	17	18	19 (17 x 18)	20 (13 + 16 + 19)	
1	Penyusunan rencana 5 Tahunan (renstra)		0.00%	-		0.00%	-		0.00%	-		0.00%	-	-	
2	Penyusunan dan penyebaran kebijakan strategis		0.00%	-		0.00%	-		0.00%	-		0.00%	-	-	



f. Perhitungan Biaya Satuan Per Mahasiswa Per Jurusan Per Tahun

Langkah terakhir dalam perhitungan ABC adalah menghitung biaya satuan per mahasiswa per jurusan per tahun dengan membagi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh jurusan dibagi jumlah mahasiswa masing-masing jurusan. Dengan demikian dapat diketahui berapa biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi per mahasiswa per jurusan atau program studi per tahun yang dihitung secara proporsional berdasarkan metode ABC>

3. Formulasi Perhitungan Biaya Kuliah Tunggal (BKT)

Perhitungan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) merupakan amanah Undang-Undang yang wajib dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Negeri termasuk PTKIN di bawah Kementerian Agama. Biaya Kuliah Tunggal merupakan satuan biaya yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Negeri dalam melaksanakan produksi jasa pendidikan bagi mahasiswa yang dibedakan atas tahun anggaran dan program studi dalam setiap Perguruan Tinggi. BKT merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per tahun pada program studi di PTKIN untuk program diploma dan program sarjana pada setiap tahun akademik. Perhitungan BKT, didasarkan atas perhitungan Biaya Satuan (unit cost) yang terlebih dahulu dihitung secara benar berdasarkan Metode Activity Based Costing (ABC) di atas. Atas

Perhitungan biaya satuan di atas, akan menghasilkan nilai Konstanta yang akan dijadikan dasar perhitungan di masing-masing indeks. Adapun formula perhitungan BKT dapat dilihat di bawah ini :

$$\begin{aligned} \text{BKT} &= f(\text{K1}, \text{K2}, \text{K3}) \\ &= C \times \text{K1} \times \text{K2} \times \text{K3} \end{aligned}$$

dimana,

- BKT : Biaya Kuliah Tunggal
- C : Constanta (Rp 4,81 juta)
- K1 : Indeks Program Studi
- K2 : Indeks Mutu Perguruan Tinggi
- K3 : Indeks Kemahalan Wilayah

Formulasi BKT di atas menggunakan konstanta sebesar Rp 4.812.928 sebagai Biaya Kuliah Tunggal basis yang dihitung dari rata-rata unit cost yang telah dihitung dari data existing dari DIPA di masing-masing PTKIN di Indonesia. Konstanta dihitung berdasarkan hasil perhitungan biaya satuan (unit cost) yang ada di seluruh PTKIN di Indonesia dan selanjutnya dihitung rata-rata unit cost selanjutnya dijadikan basis Biaya Kuliah Tunggal dan dijasikan sebagai pengali dari indek-indek yang ada dalam formula. Sedangkan **K1 = indeks jenis program studi** (menggunakan modifikasi HEFCE (Higher Education Funding Council for England) 2013 – 2014) dimana, Kedokteran : 1, 4, Teknik : 1, 3, Sain : 1,2, Agama, Sosial dan humaniora : 1. Penggunaakn Indeks Jenis Program Studi sangat wajar dan rasional untuk dipertimbangkan karena setiap jenis program studi memiliki bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda yang berkonsekwensi pada biaya operasional program studi tersebut. Program studi kedokteran merupakan program studi yang memiliki karakteristik biaya paling

tinggi yakni sebesar 1,4 artinya, program studi kedokteran memerlukan biaya 4 kali lipat dari program sosial dan humaniora. Sedangkan program studi sosial dan humaniora memiliki indeks 1, artinya program studi ini sebagai basis perhitungan biaya minimal dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di setiap program studi. Untuk **K2 = Indeks mutu / status PT** dimana, UIN : 1,2, IAIN : 1,1, STAIN : 1. Indeks Mutu Perguruan Tinggi sebagaimana di Kemendikbud didasarkan atas reputasi dan predikat yang di raih baik dalam kancah nasional maupun Internasional. Sedangkan di Kemenag, indeks mutu Perguruan Tinggi didasarkan atas predikat status PTKIN itu. Dimana PTKIN yang berstatus Uin memiliki indeks 1,2 yakni UIN memiliki konsekwensi 3 kali lipat dari biaya yang harus ditanggung PTKIN dengan status STAIN. Demikian dan seterusnya. Adapun **K3 = Indeks kemahalan** dimana : Wilayah 1 : 1, Wilayah 2 : 1,1 Wilayah 3 : 1,3. Indeks Kemahalan Wilayah, secara umum lazim digunakan untuk membedakan beban biaya antara satu lembaga dengan lembaga lainnya karena memang faktanya di wilayah Indonesia Timur mayoritas komoditinya lebih mahal daripada wilayah Indonesia bagian Barat, meskipun ada beberapa kota atau daerah di Wilayah Indonesia bagian Barat yang juga memiliki tingkat kemahalan yang tinggi. Hasil Perhitungan BKT dapat dilihat dalam Lampiran.

Terdapat persamaan dan perbedaan perhitungan BKT pada PTKIN di Kementerian Agama dan PTN di Kemenristek (dulu Kemendikbud). Beberapa persamaan dalam formula perhitungan yakni di formula perhitungan itu sendiri, yakni $BKT = f(K1, K2, K3) / BKT = C \times K1 \times K2 \times K3$. Adapun perbedaan adalah Pertama, Konstanta uang digunakan di Kemendikbud sebesar Rp 5.080.000 sebagai Biaya Kuliah Tunggal Basis yang dihitung dari data rata-rata SPP yang ada di seluruh PTN. Kedua, **K2 = Indeks mutu PT** dimana : ITB : 1,5,

UI, UGM, IPB : 1.1, PTN Lainnya : 1. Selain kedua perbedaan tersebut, semua dasar perhitungannya sama dengan Kementerian Agama.

4. Formulasi Perhitungan Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Perhitungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) juga merupakan amanah Undang-Undang dan sebagai syarat penerimaan BOPTN bagi Perguruan Tinggi Negeri tak terkecuali PTKIN. UKT yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi Negeri didasarkan atas landasan hukum yang jelas dan kuat yakni melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) yang dikeluarkan setiap tahun sesuai dengan tahun akademik. Pemberlakuan UKT berdasarkan PMA No. 96 tahun 2013 Tentang BKT - UKT bagi mahasiswa baru PTAN di lingkungan Kemenag tahun Akademik 2013/2014. UKT dibagi menjadi 3 kelompok yang ditentukan berdasarkan kelompok sosial masyarakat (ekonomi orang tua). Kelompok UKT terendah adalah kelompok 1 dengan nominal Rp 0 - Rp 400.000. Penerima UKT kelompok 1 minimal 5 % dari jumlah mahasiswa baru. Sedangkan besaran untuk UKT kelompok 2 dan kelompok 3 ditentukan oleh PTAIN masing-masing dengan pertimbangan kecukupan biaya dan subsidi silang bagi kelompok 1.

Beberapa hal yang digunakan dalam dasar perhitungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah *pertama*, UKT harus disesuaikan setiap tahun sehingga diperlukan PMA di setiap memasuki tahun akademik. Penyesuaian dilakukan berdasarkan pertimbangan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang mengalami perubahan setiap tahun. *Kedua*, UKT harus berdasarkan usulan dari pimpinan masing-masing PTKIN karena yang mengetahui secara langsung tentang besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) sebagai dasar pembebanan UKT pada mahasiswa. Posisi PMA merupakan alat legitimasi penarikan dana dari masyarakat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ketiga, UKT harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam hal ini adalah orang tua atau wali

mahasiswa dengan membagi dalam beberapa kelompok. Pembagian kelompok UKT didasarkan atas pertimbangan kemampuan ekonomi mahasiswa yakni kelompok 1, merupakan kelompok yang benar-benar berasal dari masyarakat tidak mampu sebagai kelompok mandatori yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI. Kelompok 1 diperuntukkan bagi mahasiswa miskin yang tidak mendapatkan bidik misi dengan porsi jumlah 5%. Nominal yang digunakan adalah SPP terkecil di PTAIN yakni Rp 400.000. Sedangkan kelompok 2, merupakan kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi rata-rata yakni dipandang memiliki kecukupan dalam hal ekonomi sehingga dibebani biaya pendidikan UKT yang wajar dan dipandang tidak memberatkan secara ekonomi.

Kelompok 2 dapat diartikan sebagai UKT yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang biasa membayar di setiap semester (SPP dan praktikum) tanpa memasukkan pungutan biaya pendidikan lainnya. Adapun kelompok 3, merupakan satuan UKT untuk masyarakat yang dipandang mampu secara ekonomi di atas rata-rata sehingga diharapkan mampu memberikan subsidi bagi mahasiswa kelompok 1. Kelompok 3, Kelompok 3 : diperuntukkan mahasiswa yang dianggap mampu (ability to pay) membayar seluruh pungutan (SPP+praktikum+biaya pendidikan lainnya) dengan porsi kuota sebesar.

Dalam prakteknya di IAIN Surakarta dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5 :
Simulasi UKT Program Studi PAI IAIN Surakarta
Tahun Akademik 2013/2014

Simulasi UKT Program Studi PAI IAIN Surakarta		
Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3
<p>Besaran UKT diperuntukkan untuk mahasiswa miskin yang tidak mendapatkan beasiswa, besaran nominal kelompok 2 dikurangi 50%</p> <p style="text-align: right;">Rp 450.000</p>	<p>Besaran UKT disesuaikan dengan pungutan yang biasa diterapkan kepada mahasiswa setiap semester</p> <p style="text-align: right;">Rp 900.000</p>	<p>Besaran UKT merupakan SPP + praktikum + akumulasi pungutan selama kuliah dibagi 8 semester</p> <p style="text-align: right;">Rp 1.131.250</p>

Secara Umum pemberlakuan UKT pada PTKIN berdasarkan PMA No 58 Tahun 2013 Tentang UK dan BKT memiliki kesamaan dan perbedaan dengan Permendikbud No 55 Tahun 2013. Secara sistematis dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 6 :
Komparasi Landasan Hukum Pemberlakuan UKT
di Kementerian Agama dan Kemendikbud

Kemendikbud	Kemenag
Permendikbud No 55 tahun 2013	PMA No 96 Tahun 2013
Keterangan	Keterangan
Pemberlakuan UKT berdasarkan Permendikbud No. 55 Tahun 2013 Tentang BKT – UKT PTN di lingkungan Kemendikbud.	Pemberlakuan UKT berdasarkan PMA No. 96 tahun 2013 Tentang BKT - UKT bagi mahasiswa baru PTAN di lingkungan Kemenag tahun Akademik 2013/2014.
UKT dibagi menjadi beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kelompok sosial masyarakat (ekonomi orang tua).	UKT dibagi menjadi 3 kelompok yang ditentukan berdasarkan kelompok sosial masyarakat (ekonomi orang tua).
Setiap PTN mempunyai kelompok UKT yang variatif, ada yang 3 kelompok ada juga yang 8 kelompok.	Setiap PTAIN mempunyai kelompok UKT yang standar, terdiri atas 3 kelompok.
Kelompok UKT terendah adalah kelompok 1 dengan nominal 0 - Rp 500.000.	Kelompok UKT terendah adalah kelompok 1 dengan nominal Rp 0 - Rp 400.000.
Kelompok UKT ke-2 adalah kelompok yang harus membayar Rp 501.000 – Rp 1 juta	Penerima UKT kelompok 1 minimal 5 % dari jumlah mahasiswa baru.
Penerima UKT kelompok 1 dan 2 minimal 5 % dari jumlah mahasiswa baru.	

Adapun aplikasi perhitungan BKT dan UKT untuk beberapa PTKIN dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 07 :
Besaran BKT dan UKT IAIN Surakarta
Tahun Akademik 2013/2014

No	PROGRAM STUDI	BKT	KEL.1	KEL.2	KEL.3
1.	Pendidikan Agama Islam	3,781,934	450,000	900,000	1,131,250
2.	Pendidikan Bahasa Inggris	3,781,934	450,000	900,000	1,131,250
3.	Perbankan Syariah	3,781,934	450,000	900,000	1,131,250
4.	Akuntansi Syariah	3,781,934	450,000	900,000	1,131,250
5.	Manajemen Syariah	3,781,934	450,000	900,000	1,131,250
6.	Sastra Inggris	3,781,934	450,000	900,000	1,131,250
7.	Aqidah Filsafat	3,781,934	300,000	600,000	831,250
8.	Tafsir Hadits	3,781,934	300,000	600,000	831,250
9.	Bimbingan dan Konseling Islam	3,781,934	300,000	600,000	831,250
10.	Komunikasi dan Penyiaran Islam	3,781,934	300,000	600,000	831,250
11.	Muamalat	3,781,934	300,000	600,000	831,250
12.	Ahwalus Syakhsiyyah	3,781,934	300,000	600,000	831,250

5. Formulasi Perhitungan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

Perhitungan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) juga merupakan amanah Undang-Undang yang harus dihitung secara cermat dan akuntabel. Distribusi BOPTN harus didasarkan perhitungan yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan dapat diterima secara umum. Meskipun demikian, kebijakan distribusi BOPTN merupakan wewenang Kementerian Agama RI sehingga perhitungan yang didasarkan pertimbangan akademik, merupakan salah satu variabel yang dijadikan pertimbangan.

Secara teknis perhitungan BOPTN berdasarkan rumusan yang tertulis dalam Undang-Undang yakni :

$$\mathbf{BKT = UKT + BOPTN}$$

Sehingga,

$$\text{BOPTN} = \text{BKT} - \text{UKT}$$

Dimana,

BKT : Biaya Kuliah Tunggal

UKT : Uang Kuliah Tunggal

BOPT : Biaya Operasional Perguruan Tinggi

Sesuai Undang-Undang No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan tinggi , Biaya Kuliah tunggal (BKT) adalah Uang Kuliah Tunggal (UKT) ditambah Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) , sehingga BOPTN digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional Perguruan Tinggi sebagai konsekwensi dari diberlakukannya Uang Kuliah Tunggal (UKT). Formulasi perhitungan besaran BOPT adalah Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dikurangi Uang Kuliah Tunggal (BKT – UKT = BOPT). Demikian rumusan fundamental perhitungan BOPTN. Dalam perhitungannya, BOPTN akan ditentukan setelah perhitungan total BKT di masing-masing program studi di setiap PTKIN selanjutnya dikurangi UKT rata-rata dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3. Penjumlahan tersebut akan menghasilkan berapa jumlah BOPTN yang harus diberikan pemerintah kepada Perguruan Tinggi Negeri tersebut.

Dalam penelitian ini, masing-masing PTKIN dihitung BKT berdasarkan rumusan yang ada dan selanjutnya dimasukkan dalam sebuah aplikasi berdasarkan data-data yang telah dimaukkan selanjutnya diketahui berapa jumlah BOPTN yang ada. Secara Umum, besaran BOPTN yang seharusnya diterima oleh PTKIN berdasarkan perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel 11 :
Besaran BOPTN di PTKIN Se-Indonesia
Tahun Akademik 2013/2014

NO	PERGURUAN TINGGI	BESARAN BOPTN
1	UIN Alauddin Makassar	Rp117,312,072,650
2	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Rp53,777,969,272
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Rp73,920,014,346
4	UIN Sulthan Syarif Kasim Pekanbaru	Rp130,039,649,893
5	UIN Sunan Ampel Surabaya	Rp48,573,271,025
6	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Rp95,667,389,345
7	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Rp82,970,570,939
8	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp179,944,935,591
9	IAIN Ambon	Rp23,388,470,134
10	IAIN Antasari Banjarmasin	Rp24,275,532,637
11	IAIN Bengkulu	Rp20,257,185,415
12	IAIN Imam Bonjol Padang	Rp27,300,015,405
13	IAIN Mataram	Rp29,715,164,770
14	IAIN Padangsidempuan	Rp17,478,653,325
15	IAIN Palu	Rp11,513,826,043
16	IAIN Pontianak	Rp13,918,325,604
17	IAIN Raden Fatah Palembang	Rp35,906,494,873
18	IAIN Raden Intan Bandar Lampung	Rp42,654,240,851
19	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Rp14,567,070,214

20	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Rp21,251,878,278
21	IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Rp29,315,325,707
22	IAIN Sumatera Utara Medan	Rp30,740,099,432
23	IAIN Surakarta	Rp24,664,013,284
24	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Rp30,389,995,462
25	IAIN Ternate	Rp19,441,187,417
26	IAIN Tulungagung	Rp16,650,078,172
27	IAIN Walisongo Semarang	Rp29,278,877,881
28	STAIN Al-Fatah Jayapura	Rp3,475,215,370
29	STAIN Batusangkar	Rp15,696,149,346
30	STAIN Curup	Rp16,172,017,040
31	STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah	Rp6,805,270,828
32	STAIN Jember	Rp15,783,287,480
33	STAIN Jurai Siwo Metro	Rp19,227,305,664
34	STAIN Kediri	Rp13,203,539,880
35	STAIN Kendari	Rp7,358,137,654
36	STAIN Kerinci	Rp19,306,514,280
37	STAIN Kudus	Rp23,026,794,336
38	STAIN Malikussaleh Lhokseumawe	Rp17,181,163,609
39	STAIN Manado	Rp6,775,412,707
40	STAIN Palangkaraya	Rp10,353,187,265
41	STAIN Palopo	Rp11,114,026,154
42	STAIN Pamekasan	Rp12,226,392,264
43	STAIN Pare-pare	Rp7,402,657,656

44	STAIN Pekalongan	Rp19,651,747,496
45	STAIN Ponorogo	Rp13,765,046,880
46	STAIN Purwokerto	Rp14,152,066,968
47	STAIN Salatiga	Rp7,648,160,136
48	STAIN Samarinda	Rp8,631,454,742
49	STAIN Sjekh M Djamil Djambek Bukittinggi	Rp16,416,677,210
50	STAIN Sorong	Rp1,800,188,918
51	STAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung	Rp8,145,962,266
52	STAIN Watampone	Rp9,696,193,808
53	STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa	Rp24,923,977,064
J U M L A H		Rp1,574,850,854,987

Jadi dapat disimpulkan, bahwa besaran total BOPTN yang seharusnya disediakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasional Perguruan Tinggi Negeri akibat dari pemberlakuan UKT adalah sebesar Rp 1.574.850.854.987, atau satu triliun limaratur tujuh puluh empat milyar delapan ratus limapuluh juta, delapan ratus lima puluh empat ribu, sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah.

Adapun, perolehan dana BOPTN tergantung dengan ketersediaan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat yang tertuang dalam APBN. Tentunya jumlah di atas merupakan hitungan ideal yang didasarkan atas rumus-rumus akademik dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam distribusi BOPTN bagi masing-masing PTKIN

J. Pengembangan Aplikasi Perhitungan Biaya Satuan

Untuk memudahkan perhitungan biaya satuan dan turunan perhitungan lainnya, tim mengembangkan aplikasi yang dapat digunakan oleh seluruh PTKIN se-Indonesia. Aplikasi ini sangat membantu dalam proses perhitungan berdasarkan rumusan di atas. Formula dan rumusan yang telah dibuat, dimasukkan dalam sebuah aplikasi dan selanjutnya dimasukkan data-data yang relevan dengan perhitungan, maka dalam hitungan tidak lama, akan muncul hasil biaya satuan berikut hitungan biaya turunanya.

BAB IV

PENUTUP

F. Kesimpulan

Dalam kesimpulan ini, peneliti merumuskan kesimpulan yang didasarkan atas analisis dan olah data yang dilakukan serta partisipasi para pemangku kepentingan PTKIN Se-Indonesia sebagai berikut :

1. Formulasi perhitungan biaya satuan dengan menggunakan metode Activity Based Costing (ABC) dipandang idela untuk menghitung biaya satuan secara tepat, cermat dan akuntabel. Komponen biaya seperti biayan bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead dihitung secara rinci dan dipadukan dengan proporsi pembebanan biaya kepada unit-unit kerja, sangat ideal untuk menghasilkan rumusan hitungan yang tepat dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.
2. Formulasi Biaya Kuliah Tunggal (BKT) merupakan pengembangan dari interpretasi Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang dimodifikasi dengan menyertakan nilai konstanta yang didapat dari perhitungan biaya satuan. BKT selanjutnya dihitung dengan memperhatikan statusa kelembagaan PTKIN, status program studi dan indeks kemahalan wilayah.
3. Formulasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan turunan dari UU No 12 Tahun 2012 yang menyebutkan UKT sebagai model pembayaran mahasiswa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, prosentasi prosi kelompok UKT, subsidi antar kelompok. Selain itu, UKT merupakan usulan dari masing PTKIN dan dievaluasi setiap tahunnya serta diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama RI.

4. Formulasi Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) memperhatikan berbagai hal di antaranya akreditasi lembaga, akreditasi program studi dan indeks kemahalan wilayah yang semua tertulis dalam rumusan BKT. Selanjutnya BKT yang sudah ada dikurangi dengan UKT akan menghasilkan BOPTN riil. Adapun pelaksanaan distribusi BOPTN tentunya menjadi otoritas pengambil kebijakan yakni Kementerian Agama RI.
5. Simulasi perhitungan biaya satuan (unit cost), Biaya Kuliah Tunggal (BKT) , Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sangat dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI. Adapun hasil dan proses dapat dilihat dalam lampiran penelitian ini.
6. Terakhir, pengembangan aplikasi perhitungan biaya satuan berikut turunannya diperlukan dan mutlak dibutuhkan guna memudahkan perhitungan serta demi akurasi hasil perhitungan. Aplikasi berbasis online telah dikembangkan oleh tim dan dapat diakses melalui : uc.uin-suka.ac.id

G. Kelemahan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, tentunya ditemukan banyak kelemahan dan kekurangan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Perhitungan biaya satuan tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus komprehensif dan menyeluruh khususnya bila akan digunakan untuk perhitungan BOPTN.

2. Perhitungan yang komprehensif dan berskala nasional, melibatkan resouchers yang tidak sedikit dan mengharuskan partisipasi aktif dari masing-masing PTKIN, sehingga penelitian ini akan lebih efektif bila didukung oleh kebijakan yang mengikat seluruh PTKIN.
3. Basis data yang digunakan dalam metode ABC dalah DIPA sehingga agak susah untuk menghitung secara detail dan sesuai dengan kebutuhan ideal penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, tidak semua pelaksana anggaran memahami bahasa akuntansi yang tidak dijelaskan secara mudah dalam bahasa DIPA.

Adapun saran peneliti kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Perlu dibuatkan formula yang lebih sederhana tapi tetap menggunakan metode ABC dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan bahasa dalam DIPA.
2. Formulasi yang lebih sederhana untuk perhitungan Biaya Kuliah tunggal (BKT) sangat diperlukan karena sangat relevan dengan pengambilan kebijakan distribusi BOPTN.
3. Secara umum, perhitungan biaya satuan (unit cost) sangat membantu dalam menyusun kebijakan yang lebih makro dan strategis, sehingga terkadang keberadaannya kurang membantu untuk pelaksanaan perhitungan yang bersifat teknis dan jangka pendek yang sering terjadi di PTKIN.
4. Aplikasi yang digunakan sebaiknya bisa mandiri dan tidak berbasis online, sehingga dapat digunakan dengan mudah di masing-masing PTKIN dan data

disimpan tersendiri dan selanjutnya diinput dalam aplikasi perhitungan yang tersentralisasi di Jakarta.

5. Bagi Kementerian Agama, ada abiknya bila penelitian ini dijadikan dasar dan masukan dalam pengambilan kebijakan khususnya distribusi anggaran yang lebih besar dan BOPTN secara khusus.

1. DAFTAR PUSTAKA

- Fattah, Nanang. *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*, PT. Rosda Karya, Bandung, 2002
- Hallak, J. *Analisis Biaya dan Pengeluaran Untuk Pendidikan*, International Institute For Planning, UNESCO, Paris, 1985
- Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung, 2002
- Ruseffendi, H.E.T., *Statistika Dasar untuk Penelitian Pendidikan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi, Jakarta, 1993
- Arief, F. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2002
- _____, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, September 2002
- Ali, M. (2002), "Analisis Kefektifan Biaya Dalam Manajemen dan Evaluasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada FIP UPI tanggal 15 Oktober 2002*, Bandung : UPI
- BanuWitono, *Optimalisasi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol.2, Universitas Muhammadiyah Surakarta, September 2003, Hal 151-168
- Depkeu RI, *Draft Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah: Petunjuk Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah*, Jakarta, Mei 2002
- Elsa, P.S. *Penentuan Unit Cost Paket Pelayanan Gawat Darurat Kebidahan Berdasarkan Sistem ABC*. Tesis. Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung, 1998.
- Gede Edy Prasetya, *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005

- Hicks, D.T. *Activity Based Costing for small and Mid-size Business*, 1st ed. John Wiley & Sons. Inc. New York, 1992.
- Hongren, C. T., Datar, S.M., Foster, G., *Akuntansi Biaya: Penekanan Manajerial Jilid I*, PT. Indeks kelompok Gramedia, Jakarta, 2005
- Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 2002
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, *Standar Akuntansi Pemerintahan: Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta, Februari 2004
- _____, *Standar Akuntansi Pemerintahan: Penyajian Laporan Keuangan*, Jakarta, 2010
- Masyhudi, "Analisis Biaya Dengan Metode *Activity Based Costing* Kepaniteraan Klinik Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unissula Di Rumah Sakit Pendidikan (Studi Kasus Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung)", Tesis Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Mulyadi, *Activity Based Costing System. Sistem Informasi Biaya untuk Pemberdayaan Karyawan, Pengurangan Biaya dan Penentuan Secara Akurat Kos Produk dan Jasa*. Edis6 Cetakan 2. Universitas Gadjah Mada, 2007.
- Setiati, Prihatiwi. "*Analisis Biaya Pada Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru (BP4) Semarang tahun 2004*", Tesis Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.